



HISTORIA VITAE

Seri Pengetahuan dan Pengajaran Sejarah

Volume 28, No. 2, Oktober 2014

ISSN - 0215-8809

- ☐ **SEJARAH MANUSIA SEBAGAI SEJARAH PERADABAN: BELAJAR DARI FILSAFAT SEJARAH ARNOLD JOSEPH TOYNBEE**
Sutarjo Adisusilo, J.R.
- ☐ **NYAI DALAM PERGUNDIKAN: PENDORONG MUNCULNYA KAUM INDO DI HINDIA BELANDA**
Hendra Kurniawan
- ☐ **PENGGULINGAN PRESIDEN SOEKARNO DI BALIK PERISTIWA G30S**
Yulius Dwi Cahyono
- ☐ **INDIA-PAKISTAN PASCA KOLONIAL (1964-1975): SHASTRI-INDIRA**
B. Musidi
- ☐ **FILIPINA DAN MASALAH SABAH**
A. Kardiyat Wiharyanto

Diterbitkan oleh :

Program Studi Pendidikan Sejarah – FKIP, Jurusan Ilmu Sejarah – Fakultas Sastra
Universitas Sanata Dharma
Mrican, Tromol Pos 29, Yogyakarta 55002
E-mail: spps@staff.usd.ac.id

HISTORIA VITAE

SERI PENGETAHUAN DAN PENGAJARAN SEJARAH

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Editorial	iii

*Sejarah Manusia sebagai Sejarah Peradaban: Belajar dari
Filsafat Sejarah Arnold Joseph Toynbee* 107 - 135
Sutarjo Adisusilo, J.R.

*Nyai dalam Pergundikan: Pendorong Munculnya Kaum
Indo di Hindia Belanda*..... 136 - 153
Hendra Kurniawan

Penggulingan Presiden Soekarno di Balik Peristiwa G30S 154 - 171
Yulius Dwi Cahyono

India-Pakistan Pasca Kolonial (1964-1975: Shastri-Indira) 172 - 201
B. Musidi

Filipina dan Masalah Sabah..... 202 - 214
A. Kardiyat Wiharyanto

**PENGGULINGAN PRESIDEN SOEKARNO
DI BALIK PERISTIWA G30S**

Yulius Dwi Cahyono

Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP

Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

ABSTRAK

Makalah ini hendak mendeskripsikan penggulingan Presiden Soekarno dibalik Peristiwa G30S. Mencoba menyajikan bukti keterlibatan Amerika Serikat dalam penggulingan Presiden Soekarno. Disamping itu mencoba mendeskripsikan secara sederhana keganjilan dalam film "Pengkhinatan G30S/PKI" sebagai wacana untuk menemukan titik terang dari Peristiwa G30S. Harapannya, kajian ini dapat memberi catatan tersendiri bahwa kemandirian bangsa Indonesia dalam menentukan masa depan bangsa, tanpa campur tangan pihak asing adalah benar-benar memiliki harga yang mahal.

ABSTRACT

This paper describes the overthrow of President Soekarno reversed G30S events. Try to present evidence of US involvement in the overthrow of President Sukarno. Besides trying to describe in simple anomalies in the movie "Pengkhinatan G30S / PKI" as a discourse to find a bright spot of the G-30 events. Hopefully, this study may provide a separate note that the independence of Indonesia in the future of the nation, without foreign interference is actually has a high price.

Keywords: Penggulingan, Presiden, Soekarno, Peristiwa, G30S.

PENDAHULUAN

Peristiwa G30S 1965 merupakan peristiwa yang selalu menjadi perbincangan dikalangan sejarawan profesional dan pemerhati sejarah. Peristiwa tersebut terjadi 49 tahun silam, meskipun demikian seakan-akan tidak pernah jemu untuk membahas, mendiskusikan dan memperdebatkan peristiwa ini dalam seminar mapupun dalam bentuk tulisan yang dibukukan, mengingat begitu banyak kebenaran yang masih belum terungkap dengan begitu jelas dan masih menjadi kontroversi antara lain mengenai siapa dalang di balik peristiwa G30S, bagaimana kasus-kasus pembantaian massal pasca G30S dan apa tujuan tersembunyi dibalik peristiwa ini (G30S dan pembantaian massal).

Problematika di atas sebenarnya berangkat dari peristiwa penculikan dan pembunuhan enam perwira tinggi Angkatan Darat (AD) pada subuh tanggal 1 Oktober 1965. Menurut versi Orde Baru latar belakang terjadinya peristiwa tersebut adalah akibat adanya isu sekelompok Dewan Jenderal yang dikatakan salah satu anggotanya adalah Jenderal A. Yani yang dinilai hendak melakukan tindakan menjatuhkan Presiden Soekarno. Isu ini juga yang kemudian turut mencemarkan nama baik Presiden Soekarno. Menurut Orde Baru untuk mengantisipasi isu tersebut PKI melakukan tindakan pengamanan presiden melalui penculikan dan pembunuhan atas keenam perwira tinggi AD tersebut. Beberapa perwira menolak dan dibunuh di rumah mereka dan beberapa dibawa ke Pangkalan Udara Halim, di sana mereka dibunuh dan mayatnya dimasukkan ke dalam sumur tua bernama Lubang Buaya (Michael Wood, 2013:193).

Peristiwa ini yang kemudian menandai awal dari akhir kekuasaan Presiden Soekarno dan munculnya figur tokoh nasional baru yaitu Soeharto sebagai penguasa Orde Baru. Oleh Orde Baru peristiwa ini dikatakan sebagai sebuah percobaan kudeta yang kemudian dituduhkan kepada PKI (Partai Komunis Indonesia) sebagai dalangnya. Tuduhan resmi dan pengkambinghitaman PKI baru dimulai pada 4 Oktober 1965, tepat ketika jasad para Jenderal diangkat dari Lubang Buaya (Julie Southwood & Patrick Flanagan, 2013:4)

Ingatan akan peristiwa percobaan kudeta oleh PKI ini semakin

terpatri dalam ingatan masyarakat ketika Orde Baru mewajibkan penayangan film dokumenter karya Arifin C. Noer tahun 1984 dengan Judul “*Pengkhianatan G30S/PKI*”. Film ini selalu diputar setiap tanggal 30 September malam hari dan diwajibkan untuk ditonton bahkan oleh siswa mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD). Tidak dapat dipungkiri bahwa melalui film ini muncul agitasi kebencian kepada segelintir pihak yang diberi label antagonis (PKI dan Orang atau Kelompok yang dituduh sebagai simpatisan atau anggota PKI). Pada masa pemerintahan Habibie 1998 kewajiban tayang film tersebut dihentikan pada bulan September 1998. Film tersebut ternyata mampu memberikan pengaruh yang begitu efektif dan kuat dalam membentuk pemahaman masyarakat akan peristiwa G30S sesuai dengan kehendak Penguasa Orde Baru.

Hingga akhir Orde Baru masyarakat umum masih mempercayai bahwa PKI melakukan tindakan-tindakan di luar nalar manusia. Hingga kemudian kejangalan-kejangala bermunculan ketika Orde Baru jatuh. Rekonstruksi ulang sejarah G30S yang menghadirkan sejarah alternatif kemudian bermunculan dari para peneliti sejarah profesional (baik dari dalam negeri maupun luar negeri) dan munculnya beberapa film dokumenter seperti “*40 years of silence*” dan “*Shadow Play*” yang kemudian menjadi anti tesis atas peristiwa G30S versi Orde Baru.

Melalui makalah ini penulis hendak mendeskripsikan penggulingan Presiden Soekarno melalui skenario G30S dan mengkritisi film “*Pengkhianatan G30S/PKI*” sebagai sarana propaganda Orde Baru. Ketiga hal ini dapat dipahami melalui kejangalan-kejangalan dalam peristiwa G30S, dan dokumen-dokumen rahasia CIA.

PENGGULINGAN PRESIDEN SOEKARNO

Pada masa Demokrasi Terpimpin di bawah Presiden Soekarno terdapat empat partai besar yang berperan yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI yang menduduki urutan ke 4. PKI dapat dikatakan mengalami perkembangan yang luar biasa pada masa ini. Sejak pertengahan akhir 1950-an PKI dapat dikatakan menikmati dukungan luas sekaligus menjadi musuh bersama pimpinan ABRI dan pemerintah Amerika Serikat (Julie Southwood & Patrick Flanagan, 2013:5). Pada pemilu

tahun 1955 PKI keluar sebagai pemenang nomer empat, antara lain karena pendekatan yang dilakukan oleh PKI adalah pendekatan yang sangat populis. Menjelang tahun 1960 di bawah pimpinan D.N. Aidit, PKI menjadi partai komunis terbesar setelah Cina dan Uni Soviet dengan lebih dari tiga juta anggota.

Ide Presiden Soekarno akan NASAKOM pada tahun 1961 dianggap memperkuat posisi PKI, melalui NASAKOM ini PKI memiliki perwakilan resmi di pemerintahan. Semakin dekatnya Presiden Soekarno dengan PKI, perlindungan dan pembelaan terhadap PKI dan Ide NASAKOM semakin membuat suasana politik di dalam tubuh Demokrasi Terpimpin menjadi semakin memanas antara ABRI, Soekarno dan PKI. Hal ini belum ditambah dengan pengaruh dan kekhawatiran dunia Barat khususnya Amerika Serikat akan perkembangan komunisme di Indonesia semakin membuat suasana menjadi semakin kompleks pada masa-masa selanjutnya.

Pada tahun 1965 pertarungan politik antara para Jenderal dengan Soekarno dan PKI menjadi semakin kuat. ABRI dapat dikatakan telah menjadi kekuatan yang besar dalam kancah perpolitikan Indonesia yang dimulai sejak kemerdekaan. Soekarno dan para pemimpin ABRI menikmati posisi dominan yang kian hari kian menguat, tepatnya ketika dimulainya pemerintahan Demokrasi Terpimpin tahun 1959. Dominasi tersebut dapat dilihat dengan diawasinya secara langsung oleh militer sektor-sektor kunci dibidang perekonomian. Struktur organisasi militerpun meluas hingga ke tingkat daerah sehingga tidak mustahil dominasi militer merasuk ke semua lini birokrasi sipil. Kondisi ini menggambarkan betapa besar peran dan pengaruh militer dan memunculkan kekhawatiran bahwa semua hal akan berada di bawah dominasi kelompok militer jika tidak ada penyeimbang dari kekuatan sipil dalam pemerintahan.

Melihat situasi seperti ini Soekarno berusaha dan melakukan tindakan untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan dengan menampilkan peranan sipil dalam pemerintahan. Ia juga mendorong kegiatan-kegiatan dari kelompok sipil sebagai penyeimbang terhadap militer, dari kelompok sipil ini yang paling utama adalah PKI (Harold

Crouch, 1986:44). Dalam konteks penyeimbangan ini dapat dikatakan memunculkan rivalitas antara ABRI dan PKI untuk saling berebut pengaruh Soekarno. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa konflik-konflik yang terus terjadi antara ABRI dan PKI tidak lebih daripada perjuangan memperebutkan simpati presiden semata.

Dalam upaya Soekarno untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan dan pengaruh antara militer dan sipil, Soekarno melahirkan sebuah ajaran baru yang dikenal dengan NASAKOM (Nasionalis, Agama dan Komunis). Ajaran ini dimaksudkan untuk meredakan dan menyatukan antar kelompok yang terpecah-pecah. Soekarno menghendaki terciptanya persatuan nasional yang solid. Persatuan ini pula diharapkan akan menjadi modal yang kuat dalam menghadapi Belanda di Irian Barat dan Inggris di Malaysia. Melalui persatuan yang solid ini Soekarno ingin menciptakan kesadaran akan tujuan nasional yang akan mengatasi persaingan politik yang mengancam kelangsungan hidup pemerintahan Demokrasi Terpimpin. Meskipun demikian ajaran ini yang kemudian yang secara tidak langsung turut menjatuhkan dan mencemarkan nama baik Soekarno. Presiden Soekarno dalam hal ini kurang hati-hati dalam penggunaan dan penerimaan terhadap (kata) komunisme dalam menentukan sikap BERDIKARI (Berdiri di Atas Kaki Sendiri) bagi bangsa Indonesia, tanpa melihat situasi dunia internasional yang masih dalam suasana Perang Dingin. Soekarno dalam hal ini dapat dikatakan lupa akan arah dari gerakan non blok nya.

Perlu untuk diketahui juga bahwa dalam tubuh AD sebelum G30S 1965 meletus, terdapat tiga kelompok yang saling bertentangan dan bersaing. Pertama, kelompok KSAB Jenderal A.H. Nasution. Kedua, kelompok Men/Pangad Letjen Ahmad Yani. Ketiga, Pangkostrad Mayjen Soeharto. Nasution menganut garis keras dalam menghadapi Presiden Soekarno, sebaliknya Yani merangkul sang Pemimpin Besar Revolusi dan Soeharto berdiri di sudut dengan perasaan yang diremehkan kelompok Yani yang berkuasa (Peter Kasenda, 2013:30). Dari gambaran ini terdapat dua sudut pandang yang berbeda antara Yani dan Nasution dalam mengambil sikap atas pemerintahan dan kebijakan Soekarno.

Jika dilihat lebih lanjut antara Nasution dan Yani pernah terjadi

konflik pada permulaan tahun 1965 ketika Yani memerintahkan menangkap Nasution, tetapi dibatalkan untuk menghindari konflik antar pendukung mereka masing-masing. Sementara Soeharto di mata Nasution dipandang sebagai seorang oportunist, sedangkan Yani menilai Soeharto sebagai prajurit yang bodoh (Peter Kasenda, 2013:30). Menurut Peter Kasenda (2013:30) Soeharto tidak memiliki hubungan yang baik dengan Nasution mapupun Yani. Dilihat dari aspek psikologis permasalahan pribadi ikut berpengaruh dalam perpecahan dalam tubuh AD.

Menurut Harold Crouch, staf umum AD terpecah menjadi dua kubu. Kubu kelompok tengah yaitu Yani dan kawan-kawan, yang bersikap menentang Soekarno tentang Persatuan Nasional, di mana PKI masuk di dalamnya. Kubu kedua adalah golongan kanan yang di dalamnya termasuk para jenderal, seperti Nasution, Soeharto dan lain-lain, yang sikapnya menentang kebijakan Yani dan Sukarno. Semua Jenderal tersebut anti PKI (Peter Dale Scott, 2007:16-17). Menurut pemikiran Yani anti PKI tidak berarti otomatis pro Amerika, sebaliknya anti Barat otomatis pro Timur (Amelia Yani, 2007:169). Berangkat dari pemikiran Yani ini dapat ditarik kesimpulan bahwa bangsa Indonesia harus memiliki kemandirian sendiri tanpa harus terjatuh dalam pengaruh Barat maupun Timur. Hal ini sebenarnya senada dengan pemikiran BERDIKARI Soekarno, hanya saja terdapat perbedaan dalam hal penerimaan komunisme dalam mencapai tujuan kemandirian bangsa Indonesia. Jika Soekarno menerima PKI untuk duduk dalam kabinetnya, Yani tidak pernah setuju jika ada orang PKI duduk dalam kabinet dan Yani tidak pernah setuju ataupun mendukung NASAKOM sebagai tujuan akhir (Amelia Yani, 2007:149). Konflik internal AD ini dapat dijadikan sebagai bahan analisis untuk mempermudah melihat posisi dari ketiga petinggi AD tersebut dalam Peristiwa G30S 1965.

Yani pernah mengusulkan kepada Soekarno untuk tidak memakai istilah NASAKOM tetapi NASASOS (Nasionalis, Agama, dan Sosialis). Usul ini ditolak oleh Soekarno dengan mengatakan “Kau ngerti apa Yani tentang politik?” (Amelia Yani, 2007:153). Bagi Yani sebenarnya semangat nasionalisme, kesadaran beragama, dan sikap sosialisme,

gotong royong telah ada berurat-akar dalam jiwa bangsa Indonesia. Sehingga tidak harus mengkiplat ke komunisme. NASAKOM menurut Yani justru menjadi pengelompokan seperti NAS pengelompokan dari PNI, Partindo, IPKI, dan Murba. A adalah pengelompokan dari NU, PSII, Perti, Partai Katolik, dan Parkindo. KOM hanya diwakili oleh satu aspirasi yaitu Partai Komunis. Ajaran tersebut kemudian justru membawa Revolusi Indonesia ke kiri-kirian dan mewakili aspirasi Komunis yang pada waktu itu mendapat tempat kuat di hati Soekarno. Kedudukan PKI semakin kuat dengan dukungan dari Soekarno dan ajaran NASAKOMnya.

Konflik antara ABRI dan PKI semakin menguat ketika tuntutan PKI Aidit pada Januari 1965 dan mendapat dukungan sepenuhnya dari Soekarno agar Indonesia memiliki “Angkatan Bersenjata Kelima” semakin memperkeruh suasana. Pemikiran tentang pembentukan “Angkatan Bersenjata Kelima” ini secara tegas ditentang oleh Ahmad Yani yang menyatakan bahwa Angkatan Kelima tidaklah efisien dijadikan departemen tersendiri, dan mengangkat menteri khusus serta alat-alat perlengkapannya, karena sudah ada HANSIP (Amelia Yani, 2007:179). Dapat dibayangkan bagaimana 21 juta petani dan buruh bersenjata, bebas dari pengawasan tentara. Angkatan ini sebenarnya dipersiapkan dalam proyek Ganyang Malaysia 1963-1966 yang kemudian menjadi sia-sia dan menghabiskan banyak dana, tingkat inflasi melambung hingga 600% pada tahun 1965 (Julie Southwood & Patrick Flanagan, 2013:6). Persoalan mengenai “Angkatan Bersenjata Kelima” ini berbuntut pada keretakan hubungan antara Soekarno dengan para pemimpin ABRI, terutama Ahmad Yani dan A.H. Nasution.

Pada saat konfrontasi sedang memanas dan perekonomian Indonesia merosot tajam, bulan Agustus 1965 Presiden Soekarno jatuh sakit. Situasi ini memunculkan spekulasi di kalangan tentara, PKI, dan partai-partai lainnya mengenai apakah alasan kesehatan akan membuat Soekarno meletakkan jabatannya. Dilihat dari kaca mata Barat jatuh sakitnya Soekarno memunculkan kekhawatiran siapa yang akan menjadi pengganti Soekarno menjadi presiden jika sewaktu-waktu presiden meninggal atau meletakkan jabatannya karena kesehatan yang tidak lagi

memungkinkannya untuk melaksanakan mandatnya sebagai presiden. Soekarno dinilai dekat dengan PKI dan Komunis oleh Barat, sehingga muncul kekhawatiran jika pengganti Soekarno adalah orang-orang kiri khususnya D.N. Aidit karena faktor kedekatan tadi akan memunculkan dominasi kaum Komunis di Indonesia. Sesuai dengan teori domino jika Indonesia jatuh ke Komunisme maka Asia Tenggara pun akan menjadi Komunis.

Kekhawatiran Amerika Serikat terhadap Soekarno dan pertumbuhan Komunis di Indonesia dapat dilihat dalam dokumen CIA yang berkategori "*Special Report*" 23 Oktober 1964, yang di dalamnya mengatakan bahwa CIA sudah khawatir bahwa jika Soekarno masih hidup beberapa tahun lagi, dikhawatirkan ia akan menjadi pemimpin sebuah "rezim Komunis". Sementara dalam dokumen CIA tertanggal 26 Januari 1965 dikatakan bahwa CIA semakin mengkhawatirkan usaha Soekarno untuk memotong kepentingan Amerika Serikat sambil membuka peluang bagi PKI untuk mengambil alih pemerintahan (Baskara T Wardaya, 2009:152).

Dalam situasi ini kemudian muncul isu kudeta Dewan Jenderal. Dewan ini sendiri sebenarnya tidak pernah ada, pernyataan ini diperkuat oleh pernyataan dari Ahmad Yani atas pertanyaan Soekarno, bahwa dalam AD betul ada sebuah Dewan yaitu "Dewan AD" yang bertugas untuk mengadakan pencalonan dan penilaian untuk perwira-perwira AD yang akan naik pangkat menjadi Jenderal (Amelia Yani, 2007:180). Pemusatan sekitar 20.000 tentara di Jakarta yang sedang bersiap-siap untuk unjuk kekuatan pada Hari Ulang Tahun ABRI menguatkan isu tersebut dan menimbulkan kegelisahan. Dalam kondisi yang penuh ketidak tentuan ini kubu Soeharto bersama pendukung dari dalam dan luar negeri telah antisipasi terhadap apa yang sesungguhnya terjadi : Kudeta yang disusul pembantaian berdarah G30S.

Peristiwa G30S yang selama ini dikondisikan melalui sejarah oleh Orde Baru sebagai peristiwa kudeta yang dilakukan oleh PKI semakin terkuak kebenarannya secara perlahan. Dalam peristiwa ini semakin terlihat peran serta perwira militer AD (Soeharto) dan negara-negara Barat khususnya Amerika Serikat, yang memiliki kepentingan dibalik

peristiwa ini. Secara umum Amerika Serikat menginginkan pembendungan penyebarluasan komunisme di Indonesia. Tahap pertama yang harus dilakukan adalah menjatuhkan Soekarno karena secara tidak langsung eksistensi Komunisme dan PKI berada di tangannya. Tahap ke dua adalah menyingkirkan perwira tinggi AD yang loyal terhadap Soekarno. Tahap ke tiga adalah menyingkirkan PKI dan orang-orang yang bersimpati atau dituduh PKI (orang-orang yang loyal terhadap Soekarno).

Bukti keterlibatan Amerika Serikat dalam peristiwa G30S adalah data yang diungkapkan dalam buku tulisan dari wartawan BBC Roland Challis yang berjudul *Shadow of a Revolution*. Menurut Challis, pada awal 1960-an Dinas Intelijen Amerika Serikat (CIA) telah giat melakukan menginfiltrasi eselon atas AD. Selanjutnya, CIA menjatuhkan pilihan pada seorang perwira oportunistis, untuk kemudian membantu dia dalam menjalankan suatu kudeta bertahap yang berlanjut dengan pembunuhan lebih dari satu juta orang yang dituduh sebagai komunis (Baskara T Wardaya, 2009:149).

Pada awalnya CIA mengandalkan A.H. Nasution untuk dijadikan sebagai modal untuk menjatuhkan Soekarno, namun CIA dibuat kecewa olehnya karena Nasution ternyata senantiasa taat kepada Soekarno dalam berbagai kebijakan penting. Akhirnya sosok Soeharto lah yang dapat dijadikan andalan dalam skenario penggulingan Soekarno. Soeharto adalah sosok yang dipandang anti komunis dan sosok yang oportunistis. Secara tidak langsung konflik intern dalam AD membuka peluang bagi Amerika Serikat untuk turut memainkan peran dalam penggulingan Soekarno.

Dengan demikian G30S ini sebenarnya tidak dapat disebut sebagai sebuah kudeta yang dilakukan oleh PKI. Hal ini diperkuat dengan pendapat Peter Dale Scott (2007:16) yang menyatakan bahwa G30S hanya merupakan suatu *coup* golongan kanan yang mempunyai tiga tahap yaitu :

1. Gestapu, *coup* oleh sayap kiri gadungan;
2. KAP Gestapu atau jawaban anti-Gestapu, yaitu tindakan balasan dengan cara membunuh PKI secara massal; dan

3. Pengkikisan secara terus-menerus terhadap kekuatan Soekarno yang masih tersisa.

Suatu kudeta yang secara terbuka dikobarkan dan secara rahasia dibantu oleh juru bicara dan para pejabat Amerika Serikat (Peter Dale Scott, 2007:16). Dalam mendukung politik *Containment*nya di Indonesia Amerika memberikan bantuan militer kepada AD terutama dimaksudkan untuk membatasi kiprah PKI dan membatasi kekuasaan Soekarno sekecil mungkin. Sekaligus Amerika Serikat berharap bahwa dengan tersingkirnya PKI dan Soekarno, Indonesia akan berada di bawah dominasi militer yang anti-komunis dan yang berorientasi ke Barat (Baskara T Wardaya, 2009:147-148).

Pendapat yang menyokong bahwa G30S bukan merupakan kudeta yang dilakukan oleh PKI adalah pendapat Anderson dan McVey pada 1978 yang menggunakan kajian CIA untuk membongkar dua fakta penting. Pertama, tidak ada bukti bahwa baik sebelum atau pun sesudah kudeta yang menunjukkan bahwa PKI melakukan makar. Kedua, PKI bahkan tidak berusaha memobilisasi basis massanya yang besar untuk pergolakan tanpa kekerasan (Julie Southwood & Patrick Flanagan, 2013:8-9).

Berikut ini merupakan bukti lain keterlibatan badan Intelijen Barat dalam peristiwa G30S : "...Indonesia siap jatuh ke pangkuan Barat seperti buah apel busuk. Badan-badan Intelijen Barat, ujanya akan mengatur kudeta komunis prematur ...(yang akan) ditakdirkan gagal sehingga memberi tentara legitimasi untuk menumpas komunis dan mejadikan Soekarno tahanan untuk kepentingan tentara" (Julie Southwood & Patrick Flanagan, 2013:9).

Peristiwa G30S semakin terlihat sebagai sebuah skenario besar penggulingan Soekarno melalui artikel yang ditulis oleh salah satu mantan pegawai CIA bernama Ralph McGhee. Melalui artikelnya ditulis bahwa "Pada awalnya, tentara Indonesia mengabaikan PKI karena PKI tidak terlibat percobaan kudeta. Meski demikian, para pemimpin tentara Indonesia kemudian memulai operasi pemusnahan berdarah" (Julie Southwood & Patrick Flanagan, 2013:10). Artikel ini memperkuat pendapat Peter Dale Scott bahwa kudeta tersebut dilakukan oleh sayap

kiri (PKI) gadungan adalah benar.

Dalam peristiwa G30S terdapat kejanggalan-kejanggalan yang memperkuat bahwa peristiwa ini adalah sebuah skenario besar untuk melayani kepentingan Barat dan sekelompok orang dalam negeri yang menginginkan kekuasaan. Kejanggalan-kejanggalan ini juga mementahkan sejarah Peristiwa G30S versi Orde Baru. Pertama, Jika diperhatikan tak seorang pun Jenderal anti-Soekarno yang menjadi korban dari peristiwa G30S. Pengecualian satu Jenderal yaitu A.H. Nasution yang bersifat problematik. Dalam peristiwa tersebut A.H. Nasution sempat melarikan diri tanpa mengalami luka berat, yang kemudian setelah peristiwa tersebut ia mendukung gerakan pembasmian Komunis.

Kedua, mengutip dari pendapat Baskara T Wardaya, (2009:158) terkait dengan tuduhan PKI sebagai pelaku utama G30S. Kita ketahui bahwa PKI adalah organisasi sipil. Sementara tokoh-tokoh kunci dalam Gerakan 30 September yakni Letkol Untung, Kolonel Abdul Latif dan Brigjen Soepardjo adalah justru personil militer, khususnya dari AD. Perlu diingat AD sendiri sejak pemilu 1955 telah makin sengit berlawanan dengan PKI. Penyebabnya antara lain adalah tingginya perolehan suara PKI, sementara dalam pemilu tersebut perolehan partai IPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia), yakni partai politik yang dipelopori AD, amat kecil. Pertanyaannya sedemikian hebatkah PKI sehingga meskipun merupakan organisasi sipil ia telah berhasil mempengaruhi atau “membina” para perwira AD sehingga mereka tunduk dan mau melawan kesaatuannya sendiri ?

Ketiga, Sebenarnya Soeharto telah mengetahui rencana penculikan para Jenderal beberapa hari sebelum 30 September 1965. Komandan Kolonel Abdul latief salah seorang tokoh kunci G30S melapor ke Pangkostrad Mayor Jenderal Soeharto di rumahnya di Jalan Agus Salim, Jakarta Pusat bahwa dini hari 1 Oktober 1965 akan dilancarkan operasi gerakan untuk mengagalkan rencana Kudeta Dewan Jenderal. Dalam hal ini yang menjadi persoalan dan pertanyaan mengapa Pangkostrad Soeharto tidak melaporkan rencana operasi tersebut kepada atasannya, yakni Jenderal Achmad Yani sebagai Panglima Angkatan Darat ? Atau mengapa ia tidak menyampaikan kepada Presiden Soekarno sebagai

Panglima Tertinggi ? Sementara ia tahu bahwa operasi militer tersebut adalah operasi besar dan serius, dan direncanakan akan berlangsung di Ibukota Negara (Baskara T Wardaya, 2009:158-159).

Keempat, Soeharto telah mengetahui akan adanya gerakan dan jelas bahwa gerakan tersebut ditujukan kepada AD khususnya kepada enam perwira tinggi AD. Soeharto sendiri adalah bagian dari AD sendiri, pertanyaannya mengapa ia tinggal diam ketika AD sebagai bagian dari kesatuannya menjadi sasaran gerakan tersebut ?. Hal lain yang dapat dipertanyakan mengapa Soeharto sebagai Pangkostrad tidak menjadi sasaran dari gerakan tersebut ? Menurut Baskara T Wardaya (2009:159), ada dua kemungkinan jawaban :

1. Para pelaku G30S bodoh sehingga mereka mengabaikan Soeharto dan pasukannya;
2. Telah ada sikap saling pengertian antara para pelaku G30S dengan Soeharto, atau bahkan Soeharto merupakan bagian dari G30S itu sendiri.

Kelima, satu-satunya *link* yang menghubungkan gerakan G30S dengan PKI adalah Ketua Biro Khusus PKI, yakni Sjam Kamaruzzaman alias Sjamsul Qamar Mubaidah. Ia yang bertugas membina sejumlah anggota TNI AD agar mendukung PKI. Jika benar dugaan bahwa ia sebenarnya adalah *double agent* yang bertugas memata-matai gerak PKI demi kepentingan kalangan militer ? Bagaimana mungkin Sjam dapat dijadikan sebagai bukti bahwa PKI merupakan dalang dari G30S. Hal yang patut untuk dipertanyakan kemudian mengapa Sjam sebagai tokoh kunci G30S tidak dihukum mati seperti yang lain. Sementara untuk masa-masa berikutnya banyak masyarakat dengan posisi dan kewenangan jauh di bawah Sjam yang dituduh sebagai anggota PKI dibantai. Terkait dengan kejangalan dalam peristiwa G30S ini sebenarnya masih cukup banyak, namun demikian beberapa kejanggalan di atas sudah cukup memberikan petunjuk kepada kita untuk lebih kritis dalam menyikapi peristiwa G30S ini dan terus untuk mengupayakan penyampaian sejarah yang objektif dan apa adanya untuk kemajuan bangsa Indonesia.

KRITIK ATAS FILM PENGKHIANATAN G30S/PKI (SARANA PROPAGANDA ORDE BARU)

Pasca peristiwa G30S 1965 Soeharto tampil sebagai penguasa Orde Baru dan menenggelamkan ingatan akan kontribusi dan peran Soekarno dalam membentuk bangsa Indonesia yang memiliki karakter dan kemandirian. Selama Orde Baru berkuasa segala upaya dalam meligitimasi kekuasaan terus dilakukan dan diterapkan. Salah satunya dengan melakukan sebuah produksi dan reproduksi ingatan akan peristiwa G30S. Tujuan dari produksi dan reproduksi ingatan ini sebenarnya adalah untuk menakut-nakuti masyarakat sehingga mudah di kontrol.

Dalam produksi dan reproduksi ingatan ini terdapat unsur kesengajaan untuk mengarahkan dan memproduksi opini publik dan ingatan akan apa yang terjadi pada tahun 1965 menurut versi Orde Baru. Produksi ingatan akan peristiwa 1965 ini sudah dimulai pada dua pekan pertama bulan Oktober 1965. Hampir semua koran disensor dan hanya koran-koran tertentu yang boleh terbit, khususnya harian *Angkatan Bersenjata* dan *Berita Yudha* yang dikelola oleh AD. Melalui surat kabar tersebut diceritakan segala hal terkait dengan kekejaman PKI di Lubang Buaya. Produksi dan reproduksi ingatan lainnya yang dilakukan adalah dengan pembubuhan kode "ET" (Eks Tapol) pada KTP milik orang-orang yang melawan kebijakan penguasa.

Dari sekian upaya produksi dan reproduksi ingatan 1965 yang paling efektif menurut penulis adalah film yang berjudul "*Pengkhianatan G30S/PKI*" karya Arifin C. Noer tahun 1980-an hingga 1990-an. Film ini selalu diputar setiap tanggal 30 September malam hari dan diwajibkan untuk ditonton bahkan oleh siswa mulai dari tingkat SD. Pada masa pemerintahan Habibie 1998 kewajiban tayang film tersebut dihentikan pada september 1998.

Melalui Film ini ditunjukkan kekejaman yang terjadi pada dini hari 1 Oktober 1965 yang menurut film tersebut dilakukan oleh PKI. Film ini mampu mempengaruhi aspek psikologis penontonya terlebih bagi anak-anak usia SD. Dalam benak anak-anak usia SD paling tidak akan langsung tertanam bahwa PKI itu jahat dan kejam, PKI adalah pembunuh

para Jenderal, dan Soeharto yang menumpas PKI. Ingatan ini akan tertanam kuat dalam diri anak. Hal ini penulis alami sendiri, ketika penulis duduk di bangku SD kelas empat (1992) setiap tanggal 30 September malam oleh guru di sekolah diwajibkan untuk melihat film tersebut. Guru juga memberi tugas untuk meringkas peristiwa yang ditayangkan dalam film tersebut.

Pada hari berikutnya guru juga mengulas kembali film tersebut di kelas, sehingga ingatan akan peristiwa G30S versi Orde Baru semakin kuat. Terbukti selama 22 tahun penulis masih ingat betul akan beberapa adegan di film tersebut terutama adegan penyiksaan para Jenderal oleh PKI, tanpa harus membaca buku terkait peristiwa tersebut. Ingatan ini mungkin terkesan sederhana tetapi terbukti efektif untuk menutupi kesalahan dan kebohongan Soeharto selama memimpin Orde Baru. Disamping itu membuat pemikiran generasi muda kala itu menjadi buntu untuk mampu mengkritisi sosok Soeharto. Dalam hal ini tidak kalah pentingnya adalah mampu menyembunyikan atas peristiwa pembantaian massal 1965-1966 yang dilakukan Orde Baru. Melalui reproduksi ingatan ini generasi muda dan masyarakat pada waktu itu tidak pernah mendengar adanya pembantaian masal tersebut, mereka hanya disajikan hal-hal yang menumbuhkan kebancian terhadap PKI dan Komunisme, serta menumbuhkan kekaguman terhadap Soeharto sebagai sosok penumpas gerakan tersebut. Bertolak dari kenyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikanpun menjadi sarana untuk meligitimasi kekuasaan Soeharto.

Film tersebut menjadi sarana propaganda yang begitu ampuh untuk melangengkan kebenaran versi Orde Baru akan peristiwa G30S. Dari data survei yang dilakukan Tempo pada tahun 2000, terhadap 1000 responden dari tiga kota besar di Indonesia, diperoleh data 90 persen responden menjawab bahwa mereka belajar sejarah 1965 dari film "Pengkhiantan G30S/PKI" (Kurniawan, 2013:161). Sehingga tidak mengherakan jika ingatan akan PKI sebagai pelaku dan dalang dalam peristiwa G30S 1965 begitu mengakar dan mendarah daging dalam diri masyarakat kita. Peristiwa inipun secara tidak sadar juga diwariskan secara lisan kepada teman, kerabat atau bahkan genrasi berikutnya.

Sehingga dampaknya sejarah yang subjektiflah yang diterima dan dianggap benar oleh masyarakat luas. Bahkan hingga saat ini masih terjadi.

Melalui film yang subjektif ini sebenarnya dapat kita kritisi dan dapat kita temukan kejanggalan-kejanggalan untuk menguak kebenaran akan peristiwa G30S. Meskipun film tersebut dibuat dengan tujuan melanggengkan Orde Baru dan bersifat subjektif, tetapi tidak semua adegan dalam film tersebut diputar balikan. Sebagai contohnya : pertama, adegan penjemputan para Jenderal dan penembakan Jenderal Achmad Yani di rumahnya. Mengingat semua adegan penangkapan dan penjemputan tersebut sama peris dengan kesaksian dari para saksi dan pelaku sejarah salah satunya putri Jenderal Achmad Yani yang bernama Amelia Yani. Kedua, adegan penangkapan polisi patroli bernama Sukitman yang kemudian di bawa oleh pasukan penculik ke tempat di mana para Jendral dikatakan disiksa dan kemudian dimasukkan ke dalam sumur bernama Lubang Buaya.

Terkait dengan aksi penjemputan para Jenderal oleh pasukan yang dikatakan sebagai pasukan Cakrabirawa. Setiap menjemput para Jenderal selalu menggunakan kata-kata “Bapak diminta menghadap Presiden” dari kata-kata tersebut dapat ditarik maknanya bahwa kata diminta menghadap presiden menjadi perintah yang tidak mungkin akan ditolak oleh perwira tinggi manapun mengingat Presiden adalah panglima tinggi angkatan perang. Kata-kata tersebut diharapkan menjadi senjata yang kuat untuk mengurangi terjadinya perlawanan terbukti Achmad Yani meskipun sempat marah karena sikap yang tidak sopan dari pasukan penjemput namun masih memiliki itikad untuk mematuhi perintah penjemputan, walaupun kemudian ditembak oleh pasukan penculik. Namun secara tidak sadar bahwa kalimat yang dicuapkan oleh pasukan penculik khususnya pada kata-kata “diminta menghadap presiden” bermaksud untuk menandakan bahwa pasukan tersebut bergerak atas perintah presiden. Pernyataan ini jika dilihat ulang memiliki makna atau dimaksudkan untuk mengesankan bahwa Presiden Soekarno turut bertanggung jawab atas gerakan tersebut.

Sementara Sukitman yang pada waktu ditangkap oleh pasukan

penculik berpangkat Angen Polisi Tingkat II. Sebelum ditangkap ia sedang berpartroli di Wisma Angkasa sekitar pukul 03:00 pagi. Ketika itu ia mendengar serentetan tembakan senjata ia bergegas untuk melakukan pengecekan, seketika itu juga Sukitman ditangkap dan ditahan oleh sekelompok pasukan penculik. Oleh penculik Sukitman diikat dan ditutup matanya, kemudian ia diturunkan disebuah kebon karet (lokasi di sekitar Lubang Buaya) dan dibawa masuk kedalam sebuah tenda. Ia melihat beberapa perwira tinggi yang penuh luka dibawa masuk ke dalam tenda. Di lokasi Sukitman melihat juga beberapa perwira tinggi dibawa keluar melewati dirinya dan mendengar teriakan ganyang kabir (kapitalis birokrat) mengiringi jenazah para perwira tinggi yang kemudian dimasukan (kepalanya lebih dahulu) ke dalam sumur yang disebut Lubang Buaya dan diikuti serentetan tembakan.

Dari adegan ini yang menjadi ganjalan adalah mengapa Sukitman setelah peristiwa penguburan para Jenderal dilepaskan begitu saja pagi harinya oleh para kelompok penculik ? Dalam sebuah aksi pembunuhan terencana tingkat tinggi para pelaku tidak akan mungkin meninggalkan jejak ataupun seorang saksi untuk menjaga keselamatan dari kelompok tersebut. Jika diinterpertasikan sangat mungkin bahwa keberadaan Sukitman di lokasi penyekapan dan penguburan para Jenderal tersebut adalah sebuah situasi yang dikondisikan untuk memberikan saksi alibi yang menuntungkan kelompok tertentu.

Hal ini terkait dengan begitu cepatnya penemuan lokasi sumur tempat para Jenderal dikuburkan. Pencarian lokasi tersebut dikepalai oleh komandan RPKAD Sarwo Ediwibowo dengan bantuan atau petunjuk dari Sukitman untuk menemukan sumur tersebut. Suatu hal yang tidak masuk akal jika para pelaku penculikan dan pembunuhan para Jenderal membiarkan begitu saja ada seseorang yang nantinya berpotensi mengetahui lokasi penguburan para Jenderal yang nantinya dapat dijadikan bukti di dalam pengadilan.

Terkecuali jika para pelaku penculikan tersebut adalah benar para parajurit gadungan, yang benar-benar melakukan kesengajaan untuk memperbesar peluang ditemukannya sumur tersebut dengan cepat. Dengan demikian dapat disajikan sebuah bukti konkrit dalam waktu yang

relatif singkat untuk segera memancing kemarahan masyarakat terhadap PKI, guna mendukung hadirnya tenaga baru dari rakyat untuk menyingkirkan PKI. Mengingat bukti kekejaman telah ditemukan. Tentunya hal ini juga akan mempercepat proses penyingkiran golongan kiri dan pembubaran PKI.

PENUTUP

Peristiwa G30S menjadi bagian dari sisi gelap sejarah bangsa Indonesia. Di mana Indonesia tidak hanya kehilangan enam Perwira Tinggi Angkatan Darat yang sangat potensial, tetapi bangsa ini kemudian juga kehilangan jutaan nyawa yang belum tentu bersalah akibat dituduh sebagai anggota atau simpatisan PKI. Peristiwa ini sebenarnya merupakan bagian dari rangkaian politik luar negeri Amerika Serikat untuk menjatuhkan Soekarno melalui skenario G30S dengan memanfaatkan konflik internal dalam Angkatan Darat. Amerika Serikat dalam hal ini mencari bantuan dari perwira oportunistis yaitu Soeharto untuk menyingkirkan PKI melalui sebuah kudeta prematur (kudeta yang sengaja digagalkan). Langkah pertama yang diambil adalah menyingkirkan Soekarno sebagai sosok yang dipandang oleh Amerika Serikat sebagai pelindung eksistensi PKI. Kedua menyingkirkan Perwira Tinggi AD yang loyal kepada Soekarno. Keempat adalah pembubaran PKI dan penyingkiran golongan kiri dan pendukung Soekarno.

Pada masa Orde Baru Soeharto melakukan produksi dan reproduksi ingatan akan kekejaman PKI melalui berbagai media baik media massa, pendidikan, dan film. Dari sekian media propaganda yang diproyekkan oleh Orde Baru yang paling efektif memberi pengaruh adalah film berjudul "Pengkhiran G30S/PKI". Melalui film ini opini publik dibentuk sesuai dengan kehendak Orde Baru untuk melegitimasi kekuasaan Orde Baru.

DAFTAR PUSTAKA

Amelia A. Yani. 2007. *Achmad Yani Tumbang Revolusi*. Yogyakarta : Galang Press

Baskara T Wardaya. 2009. *Bung Karno Mengugat Dari Marhaen, CIA,*

- Pembantaian Massal 65 hingga G30S*. Yogyakarta: Galang Press.
- Crouch, Harold. 1986. *Militer dan Politik Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Kurniawan, dkk. 2013. *Pengakuan Algojo 1965 Investigasi Tempo Perihal Pembantian 1965*. Jakarta: Tempo Punlishing.
- Peter Kasenda. 2013. *Soeharto Bagaimana Ia Bisa Melangengkan Kekuasaan Selama 32 Tahun ?*. Jakarta: Kompas.
- Scott, Peter Dale. 2007. *Peran CIA dalam Penggulingan Soekarno*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Southwood, Julie & Patrick Flanagan. 2013. *Teror Orde Baru Penyelewengan Hukum & Propaganda 1965-1981*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Wood, Michael. 2013. *Sejarah Resmi Indonesia Modern Versi Orde Baru dan Para Penentangannya*. Yogyakarta: Ombak.